

Bupati Achmad Fauzi: Sensus Ekonomi Bukan untuk Pendataan Pajak



Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumenep Endro Riski Erlazuardi

Sidang Korupsi BSPS Sumenep Masuki Tuntutan

Sumenep, Memorandum

Perkara dugaan tindak pidana korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sumenep tahun anggaran 2024 memasuki tahapan penting.

Lima terdakwa dalam kasus tersebut dijadwalkan menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (6/7).

Agenda tuntutan ini menjadi salah satu fase krusial dalam proses persidangan. Sebelumnya, majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi, ahli, serta para terdakwa dalam sejumlah sidang yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep Endro Riski Erlazuardi membenarkan bahwa sidang tuntutan dijadwalkan berlangsung hari ini. "Hari ini kalau saya tidak salah. Agendanya pembacaan surat tuntutan," ujar Endro saat dikonfirmasi wartawan.

Perkara ini sebelumnya sempat menyita perhatian publik. Dalam persidangan yang berlangsung pada akhir Juni 2026 lalu, sejumlah terdakwa menyebut nama oknum anggota DPRD Sumenep maupun DPRD Jawa Timur saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Munculnya nama-nama itu memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi program bantuan rumah tersebut.

Meski demikian, Endro menegaskan bahwa proses penyidikan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Pihaknya tidak dapat memberikan penjelasan lebih jauh terkait perkembangan penyidikan maupun kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Kalau terkait itu mungkin bisa ditanya ke Kejati Jatim. Karena penyidikan perkara yang sedang sekarang ini kan pihak kejati yang nyidik," tegasnya.

Diketahui, perkara dugaan korupsi BSPS Sumenep merupakan hasil penyidikan Kejati Jatim. Kasus tersebut menyeret lima terdakwa yang diduga memiliki peran dalam pelaksanaan program BSPS tahun 2024. **(*uri/nov)**

Sumenep, Memorandum

Pemkab Sumenep tepis isu pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berkaitan dengan pendataan maupun penarikan pajak. Maka dari itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun ini, pemerintah daerah setempat terus memberikan pendampingan bersama BPS. Bahkan, melibatkan perangkat daerah dan aparat desa pada aspek-aspek teknis di lapangan.

Tujuannya memperlancar proses pendataan, meski tidak seluruh petugas didampingi secara langsung. Bupati memastikan informasi yang dikumpulkan BPS hanya digunakan sebagai

dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

Dalam perjalanannya sensus ekonomi diterpa isu berkaitan dengan penarikan pajak, tapi hal ditegaskan oleh bupati bahwa kabar angin tersebut tidak benar. "Sebenarnya data ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Itu hanya isu," tegas Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Senin (6/7).

Karena menurutnya, isu ini dapat berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam



Bupati Sumenep Achmad Fauzi

memberikan data. Dari sensus ini pemerintah daerah dan BPS adalah data yang akurat untuk menjadi landasan kebijakan pemerintah. Kembali dikatakan petugas

sensus mengajukan berkaitan dengan penghasilan atau kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang diperlukan untuk memotret kondisi masyarakat secara menyeluruh.

Oleh sebab itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh isu yang keliru mengenai sensus ekonomi. Pun masyarakat diminta memberikan jawaban yang jujur agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.

Karena sensus ini akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Maka kejujuran masyarakat dibutuhkan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan. **(uri/nov)**

Program Kopling Polres Bangkalan Dekati Warga

Bangkalan, Memorandum

Menindaklanjuti program kegiatan kopi keliling (Kopling), Kasatbinmas Polres Bangkalan AKP Edi Purnomo, bersama anggota kembali turun ke lapangan.

Kali ini, didampingi Bhabinkamtibmas AKP Edi berinisiatif menyambangi komunitas warga Jalan Pertempuran di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Kota Bangkalan pada Sabtu malam (4/7).

Tujuannya adalah untuk cangkrukan bersama sambil menikmati suguhan secangkir kopi dan camilan ringan di tengah kesejukan angin malam.

"Alhamdulillah, kehadiran polisi disambut antusias oleh puluhan warga Jalan Pertempuran. Pak Lurah dan Ketua RW 8 Kelurahan Pejagan bahkan juga ikut bergabung," kata Edi.

Kegiatan Kopling ini, lanjut Edi, merupakan salah satu program yang kini rutin diagendakan oleh satbinmas. Targetnya adalah agar polisi sebagai pengemban amanah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat selalu berbau menyatu dengan berbagai komponen sosial kemasyarakatan. "Alhamdulillah kegiatan program Kopling ini selalu disambut antusias warga," ungkap Edi.

Realitas ini membuktikan bahwa polisi sebagai penanggung jawab jaga dan pengawal pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di garda terdepan tidak hanya gerak cepat hadir jika ada problematika di tengah masyarakat, tetapi wajib selalu menyatu dengan rakyat dalam setiap kesempatan.

Salah satunya, malam itu personel satbinmas guyub cangkrukan dengan warga Jalan Pertempuran sambil menyeruput kopi hangat. "Asyik dan nikmat memang. Apalagi sesekali diselingi guyonan dan kelakar segar," imbuh Edi.

Seperti kegiatan serupa sebelumnya,



Suasana saat Kasatbinmas AKP Edi bersama anggota cangkruk bareng warga Kelurahan Pejagan sambil menikmati kopi hangat pada malam hari.

melalui giat Kopling kali ini, kasatbinmas mengangkat topik bahasan tentang pentingnya menjaga dan mengawal kamtibmas bersama. Dalam konteks ini, antara polisi dan masyarakat harus berkomitmen untuk membangun sinergisitas serta kolaborasi demi menjaga keamanan bersama.

Intinya, tanggung jawab untuk menjaga keamanan wilayah tidak bisa sepenuhnya dipasrahkan kepada institusi Polri karena jumlah polisi yang amat terbatas.

Oleh karena itu, mesti ada jalinan kerja sama antara polisi dengan masyarakat untuk bersama-sama menjaga

harkamtibmas. "Termasuk kebersamaan polisi dengan warga Kelurahan Pejagan tentunya," harap Edi.

Syukurlah, lanjut kasatbinmas, warga menyadari pentingnya menjaga dan mengawal kamtibmas bersama hingga kesepakatan pun akhirnya terwujud.

Duet polisi dan warga siap bersinergi serta berkolaborasi. Di satu sisi, polisi akan tetap rutin menerapkan giat patroli malam, sedangkan warga siap untuk menggalakkan kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Muara tujuannya agar kompleks

pemukiman penduduk di Kelurahan Pejagan, setidaknya di sekitar area Jalan Pertempuran, bebas dari ragam gangguan kamtibmas, terutama dari gangguan tindak kejahatan 3C, yakni pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), termasuk aksi begal motor.

"Kami sarankan pula agar warga waspada bursa peredaran dan transaksi narkoba. Jika ada gelagat mencurigakan, segera laporkan ke pos polisi terdekat," pungkas Edi. **(ras/nov)**

Sinergi TNI-Rakyat Sejahterakan Bumi Madura

Bangkalan, Memorandum

Pembukaan program Bhakti TNI AD tahun 2026 untuk wilayah Madura berlangsung meriah dan spektakuler di Alun-Alun Bangkalan pada Senin (6/7).

Ribuan masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan upacara pembukaan yang dipadukan dengan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan hiburan sebagai wujud kemandunggalan TNI bersama rakyat.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, jajaran Forkopimda Jatim, Forkopimda Bangkalan, serta para tokoh masyarakat, dan ribuan warga dari berbagai daerah di Madura.

Suasana pembukaan semakin semarak dengan pawai karnaval, pertunjukan musik tradisional Ul Daul khas Madura, aksi *rolling thunder* komunitas motor *custom*, bazar produk unggulan UMKM Madura, bakti sosial, hingga pelayanan pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis bagi masyarakat.

Peresmian program Bhakti TNI AD ditandai dengan penyematan tanda pelaksanaan kepada perwakilan peserta upacara serta penempelan "Peta Emas Jawa Timur" oleh



Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Bupati Bangkalan Lukman Hakim berfoto bareng jajaran Forkopimda Jatim, Forkopimda Bangkalan, serta para tokoh masyarakat, dan ribuan warga dari berbagai daerah di Madura.

gubernur bersama Pangdam V/Brawijaya sebagai simbol dimulainya pelaksanaan Bakti TNI AD tahun 2026 di wilayah Madura.

Dalam amanatnya, pangdam menegaskan bahwa program Bakti TNI AD merupakan implementasi nyata Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

sekaligus bentuk pengabdian TNI kepada bangsa dan negara.

Pemilihan Madura sebagai lokasi pelaksanaan didasarkan pada komitmen TNI AD untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan.

"Melalui Bakti TNI ini, kita memiliki target pembangunan yang komprehensif. Pada sasaran fisik akan dibangun 33 jembatan, 52 sumur bor, 20 rumah ibadah, renovasi 400 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) beserta fasilitas MCK, rehabilitasi 12 sekolah, serta 4 panti asuhan," ujar pangdam.



Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Bupati Bangkalan Lukman Hakim membuka program Bhakti TNI AD tahun 2026.

Selain pembangunan fisik, Bakti TNI AD juga menyasar berbagai program nonfisik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Program tersebut meliputi operasi katarak bagi 313 orang, operasi bibir sumbing, khitanan massal untuk 300 anak, donor darah sebanyak 1.000 kantong, bakti kesehatan bagi 400 orang, bakti lingkungan di 200 titik, penanaman 2.000 pohon trembesi, hingga pemberian 23 kaki palsu dan 124 kursi roda.

Pangdam berharap seluruh program tersebut dapat terlaksana secara tepat sasaran dan

memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk menjaga hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai wujud nyata kemandunggalan TNI dan rakyat.

Sementara itu, Khofifah menegaskan bahwa Bakti TNI AD merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan daerah.

Menurutnya, program ini menjadi wadah memperkuat semangat gotong royong yang melibatkan pemerintah pusat,

pemerintah daerah, TNI, Kementerian dan lembaga, ulama, serta seluruh elemen masyarakat di Madura.

"Program ini bertujuan membangun sinergi, kolaborasi, dan gotong royong secara berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ungkap Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada wilayah Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, sebagai lokasi pelaksanaan program Bakti TNI AD.

Menurutnya, Bakti TNI merupakan bukti nyata kepedulian TNI dalam membantu percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Melalui program Bakti TNI ini, Pemkab Bangkalan merasa sangat terbantu dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat," tutur bupati.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan Bhakti TNI AD sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal," tandas Lukman. **(ras/nov)**

Satreskrim Polres Bangkalan Bekuk Alap-Alap Curanmor di Dua TKP

Bangkalan, Memorandum

Tim opsnal Sa-treskrim Polres Bangkalan ber-hasil membekuk pelaku pencurian kendaraan bermor-tor. Terbongkarnya kejahatan ini, setelah rute pelarian pelaku beroperasi di wilayah Kecamatan Kota Bangkalan terlarak rekaman CCTV. Satu dari dua kawanan bandit penjarah motor warga di dua TKP berbeda berhasil dibekuk. "Syukurilah, berbekal rekaman CCTV, identitas dua pelaku curanmor penjarah motor warga di dua TKP Kota Bangkalan berhasil dideteksi anggota," jelas Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Eriek Triyasworo, Sabtu (4/7).

Salah satu pelaku, Kabupat-an Sidorarjo. Tak ada perlawan-an. Sedangkan rekan terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. "Saat disergap di terduga pulas di salah satu rumah tempat persembunyiannya," ungkap AKP Eriek.

Didampingi Kasit Humas, Ipdag Agung Intama, Kasat Reskrim menjelaskan kronologis



Kasat Reskrim AKP Eriek Triyasworo didampingi Kasit Humas Ipdag Agung Intama menyampaikan keterangan pers

kawanan pelaku menjarah mo-tor warga di dua TKP Berbeda. Berdasar hasil rekaman CCTV menjarah motor warga di Jalan Letnan Mestu, Kelurahan Paja-gan, Kecamatan Kota Bangkalan.

Kawanan bandit ini punya peran berbeda saat beraksi di lapangan. Satu bertugas seba-gai pemetik (penjarah-Red) dengan menggunakan kunci T, rekannya berperan sebagai pemantau menunggu di atas motor, dan siap kabur jika aksi mereka terendus oleh warga.

Berikutnya, duo bandit jalanan ini kembali berulah.

Kali ini, menggunakan kunci T, nekad menjarah motor warga di Jalan KH Moh Kholil, Kelu-rahan Dembangan. Juga terekam CCTV. Bahkan kasus curanmor ini berhasil ditangkap. Satu tempat viral di jagad medsos.

Curanmor di dua TKP ber-beda itu, terdeteksi dilakukan oleh orang yang sama. "Dari hasil rekaman CCTV ini an-gota TKP ini berhasil menyita barang bukti sebuah kunci T yang jamak digunakan untuk merusak rumah kunci kontak motor warga. Akibat ulahnya terduga pelaku bakal dijera

Pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023. (ras/day)

Polsek Balongbendo Tindaklanjuti Dugaan Penjualan Miras

Hasil
Pengecekan Nihil

Sidoarjo, Memorandum

Polsek Balongbendo bergerak cepat meninda-klanjuti beredarnya video viral di media sosial yang menyebut adanya dugaan penjualan minuman keras (miras) jenis "Es Mony" di

warung kopi di Desa Penambangan, Keca-matan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.

Pada Sabtu (4/7) pukul 21.30, anggota piket Polsek Balongbendo yang dipimpin Perwira Pengawas (Padal) Ipdag Sugeng H mendatangi dua warung kopi milik Totok dan Nuril untuk melakukan pengecekan langsung.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Aiptu Hari Purnomo, Aiptu Yusuf, Aipda Danang, serta Bripta Endri S.

Hasil pemeriksaan di lokasi menun-jukan tidak ditemukan minuman keras jenis arak maupun "Es Mony". Petugas juga tidak mendapati adanya pengunjungan yang sedang mengonsumsi minuman keras di kedua warung kopi tersebut.

Sebagai langkah preventif, Ipdag Sugeng H memberikan imbauan kepada para pe-milik warung agar tidak menjual minuman keras maupun membiarkan pengunjungan mengonsumsi miras di tempat usahanya. Apabila di kemudian hari ditemukan ad-anya pelanggaran, pihak kepolisian akan



Petugas memastikan tidak ada penjualan minuman keras "Es Mony" di warung kopi Desa Penambangan.

berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Satpol PP Kecamatan Balongbendo untuk mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolsek Balongbendo, Kompol Su-nari, menegaskan bahwa setiap informasi yang beredar di masyarakat, termasuk me-dia sosial, akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional guna memast-ikan kebenarannya.

"Kami mengapresiasi kepedulian ma-syarakat yang menyampaikan informasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan. Dari hasil pemeriksaan, tidak

ditemukan adanya penjualan maupun konsumsi minuman keras di lokasi yang dimaksud. Meski demikian, kami tetap memberikan imbauan kepada pemilik warung agar tidak menjual miras," jelas Kompol Sunari.

la menambahkan, Polsek Balongben-do berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mengedepankan langkah pembinaan dan pencegahan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. (san/day)

Kapolres Bojonegoro Hadiri Pagelaran Wayang Kulit

Silaturahmi dan Lestarian Budaya Nusantara

Bojonegoro, Memorandum

Kapolres Bojone-goro AKBP Afrhan Satya Permadi menghadiri Paga-laran Wayang Kulit bertajuk "Patemon Budaya Nusantara" yang menampilkan Ki Dalang Bimo Anggoro dengan lakon "Semar Mbangun Kayangan" di Desa Ngorogunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro.

Kehadiran Kapolres dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhad-ap pelestarian budaya bangsa sekaligus mempererat hubun-gan dengan masyarakat me-lalui kegiatan seni dan budaya.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa budaya merupakan identitas bangsa yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Melalui pagelaran wayang kulit, diharapkan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, serta gotongroyong dapat terus diwariskan kepada generasi muda.

"Melalui kegiatan budaya seperti ini, diharapkan dapat



KAPKB Afrhan Satya Permadi menghadiri pagelaran wayang kulit menampilkan Ki Dalang Bimo Anggoro dengan lakon Semar Mbangun Kayangan.

memperkuat persatuan dan kesatuan serta menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Budaya merupakan identitas bangsa yang harus terus dijaga dan dilestarikan," demikian pesan yang disampaikan dalam ke-giatan tersebut.

Pagelaran Wayang Kulit

Bojonegoro.

Melalui kegiatan budaya yang melibatkan berbagai ele-men masyarakat, Polres Bo-jonegoro berharap semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya lokal terus tumbuh, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif. (top/day)

Surabaya, Memorandum

Langkah MS (28), warga Jalan Dukuh, Kenjeran, dalam bisnis gelap narkoba terhenti. Pria yang baru dua minggu menjadi pengedar sabu-sabu ini, diringkus anggota Satresnar-koba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, sebelum sempat mendedarkan barang haram belanjaan terakhirnya.

Dari tangan tersangka, petugas berhasil menga-mankan barang bukti berupa tiga paket sabu dengan berat total 3,386 gram serta sebuah telepon seluler yang diduga kuat digu-nakan untuk bertransaksi.

Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Agus Putrawan, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Kamis (4/6) malam. Petu-gas yang sudah mengantongi informasi bergerak cepat meny-ergap tersangka saat berada di pinggir Jalan Randu, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran.

"Saat didegledah, tersangka MS kedatangan membawa nar-kotika jenis sabu sebanyak tiga buah klip plastik dengan berat total 3,386 gram," ujar AKP Agus Putrawan, Senin (6/7/2026).

Berdasarkan hasil pemer-iksaan penyidik, MS mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seorang bandar berinisial PO, yang saat ini telah ditetapkan dalam daftar

pencarian orang (DPO). Tersangka membeli sabu dari PO dengan harga Rp 650 ribu per gramnya. Meski baru menerima pasokan sabu dari PO.

Kepada polisi, MS membe-berkan motifnya nekat terjun ke dunia hitam. Ia tergiur den-gan upah uang tunai sekaligus fasilitas mengonsumsi narkoba secara gratis.

"Tersangka mengaku, apa-bila berhasil menjual atau mendedarkan sabu tersebut, ia akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp75.000, plus bisa mengonsumsi sabu secara cuma-cuma," imbuh Agus.

Sayangnya, belum sempat menikmati keuntungan dari tiga paket sabu terakhirnya, MS sudah lebih dulu dijablokan ke dalam jeruji besi. Saat ini, Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih melakukan pengembangan intensif untuk memburu PO selaku penyuplai atas kasus ini. (alf/day)

Satlantas Polresta Banyuwangi Tertibkan Jukir Liar

Resahkan
Warga
Kertosari

Banyuwangi, Memorandum

Satlantas Polresta Banyu-wangi menin-dakkanjuti kelu-han masyarakat terkait mara-nyaka aktivitas jukir parkir (jukir) liar di ka-wasan Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi. Melalui patroli rutin yang digelar pada Minggu (5/7), petugas mem-berikan pembinaan kepada sejumlah jukir yang diduga beroperasi tanpa izin dan kerap dikeluhkan karena meminta uang parkir dengan cara yang dianggap memaksa.

Patroli dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di ruang publik. Petugas menemukan beber-apa orang yang diduga menjalankan aktivitas parkir tanpa izin resmi. Mereka kemudian diberikan pembinaan dan edukasi agar menghentikan praktik pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan.

Anggota Satlantas Polresta Banyuwangi, Briptu Bintara Putra, mengatakan patroli tersebut merupakan respons atas laporan masyarakat yang merasa resah dengan ke-beradaan jukir liar. "Patroli ini



Pasuruan Raya

Pasuruan, Memorandum

Pelarian komplotan pencuri hewan ternak yang selama ini meresahkan warga Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, akhirnya terhenti. Satreskrim Polres Pasuruan berhasil meringkus tiga pelaku pencurian sapi dalam operasi penangkapan yang dilakukan pada Minggu (5/7) dini hari.

Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Prigen

Jaga Stabilitas Pangan hingga Tingkat Kecamatan

Pasuruan, Memorandum

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah mandiri guna menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendorong daya beli masyarakat. Kali ini, kegiatan yang diinisiasi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyasar warga di Halaman Kantor Balai Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, pada Minggu (5/7).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Khofifah tidak hanya memantau kelancaran distribusi bahan pokok, tetapi juga menyapa langsung masyarakat.

Sebagai bentuk perhatian, ia membagikan bantuan beras kepada sejumlah lansia di Desa Bulukandang.

Tidak hanya itu, Khofifah juga mendorong produk UMKM warga desa setempat untuk dibagikan secara gratis kepada para pengunjung pasar murah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, Iwan, menyatakan bahwa pasar murah di Desa Bulukandang ini merupakan titik pelaksanaan ke-81.

Ia menegaskan, terdapat pergeseran strategi lokasi demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pasar murah ini adalah yang ke-81. Sesuai arahan Ibu Gubernur, kita ingin mendekatkan akses kebutuhan pokok. Jika biasanya pasar murah digelar di alun-alun atau area kota, kini kita geser ke tingkat desa dan kecamatan agar masyarakat lebih mudah men-



Gubernur Khofifah Indar Parawansa melihat komoditi lokal yang dijual di pasar murah Prigen.

jangkau harga murah,” ujar Iwan.

Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga yang disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Komoditas yang tersedia meliputi beras premium, beras SPHP, telur dan daging ayam, minyak goreng (Minyakita), gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai, hingga tepung terigu.

Iwan menambahkan, pelaksanaan pasar murah ini merupakan langkah strategis untuk merespons fluktuasi inflasi bulanan.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim berkolaborasi dengan Bulog serta melibatkan pelaku IKM/UMKM lokal.

“Kami terus berkolaborasi dengan pelaku UMKM dan mencatat besaran transaksi yang terjadi. Harapannya, langkah ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga me-

Ketiga pelaku yang berhasil diamankan adalah AP (28) dan Hen (46), keduanya merupakan warga Desa Andonosari, serta PS (28) warga Desa Sumberpitu, Kecamatan Tutur.

Mereka ditangkap tanpa perlawanan oleh tim gabungan Satreskrim Polres Pasuruan bersama

Unit Reskrim Polsek Nongkojajar sekira pukul 04.00.

Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Joko Suseno, menjelaskan bahwa penangkapan ini bermula dari laporan warga terkait pencurian di Dusun Krajan I, Desa Andonosari.

Dalam aksinya, para pelaku menyasar kandang sapi milik Atim (63) yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga.

“Komplotan ini tergolong nekat. Mereka sudah menyiapkan kendaraan pikap jenis L300 untuk membawakabur sapi hasil curian. Pelaku beraksi dengan dua kendaraan, yakni satu unit sepeda motor dan satu unit mobil pikap,” ujar Joko Suseno, saat dikonfirmasi, Senin (6/7).

Aksi komplotan ini sebenarnya direncanakan dengan rapi saat situasi sekitar kandang sepi.

Namun nasib berkata lain, jejak mereka terungkap berkat rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di beberapa ruas jalan Desa Andonosari.

Rekaman tersebut memperlihatkan kendaraan yang digunakan pelaku saat melarikan hewan ternak curiannya.

Berbekal bukti petunjuk dari CCTV, petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku.

AP dan Hen ditangkap saat berada di rumah salah satu pelaku di Desa Andonosari, sementara PS diringkus petugas saat sedang



Ketiga pelaku pencuri sapi diamankan.

berada di rumah mertuanya.

Saat ini, ketiga tersangka telah dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Pasuruan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

“Ketiga pelaku terancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun,” tegas Joko Suseno.

Pihak kepolisian mengimbau warga agar tetap waspada dan memperkuat sistem keamanan lingkungan (siskamling), terutama bagi peternak yang memiliki kandang di luar area pemukiman padat. **(kd/mh/day)**

Pelajar Winongan Jadi Korban Penipuan

Motor dan Ponsel Raib

Pasuruan, Memorandum

Nasib nahas menimpa Muhammad Deni Fadhil (16). Pelajar asal Desa Kandung Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan ini menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan oleh dua pria tak dikenal di Jalan Raya Mendalan, Kecamatan Winongan, Minggu, (5/7). Akibat aksi tipu daya tersebut, korban harus merelakan sepeda motor dan telepon genggamnya dengan total kerugian mencapai Rp 27,5 juta.

Kapolsek Winongan, AKP Nanang Abidin, membenarkan adanya peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16.20.

Menurut keterangan Nanang, kejadian bermula saat korban dalam perjalanan pulang dari Kota Pasuruan bersama rekannya.

“Saat melintas di Jalan Raya Mendalan, korban dihampiiri dua pria yang mengendarai sepeda motor Honda Fazzio warna hitam. Pelaku meminta korban berhenti dengan alasan ingin bertanya,” ujar Nanang Abidin, Senin (6/7).

Dalam melancarkan aksinya, salah satu pelaku berpura-pura



Petugas unit reskrim mendatangi TKP

meminta tolong kepada korban untuk menemui pamannya.

Pelaku beralasan ingin meminta bantuan korban agar menjelaskan kepada sang paman bahwa sepupunya sedang mengerjakan tugas kelompok.

Karena merasa iba dan percaya, korban akhirnya bersedia ikut berboncengan dengan salah satu pelaku.

Sebelum pergi, korban sempat menitipkan ponselnya serta kunci sepeda motor Honda Vario 125 miliknya kepada rekan yang menunggu di lokasi.

“Di saat itulah, pelaku lainnya melancarkan aksinya. Ia meminta

ponsel korban dan membawa kabur sepeda motor Vario milik korban dengan dalih akan menyusul ke lokasi tempat korban berada,” jelas Kapolsek.

Sementara itu, korban yang dibawa berkeliling oleh pelaku ke area Desa Mendalan justru diturunkan di sebuah area pemakaman dengan alasan pelaku hendak menjemput saudaranya.

Tanpa rasa curiga, korban menunggu di sana. Namun, setelah ditunggu cukup lama, pelaku tak kunjung kembali.

Korban akhirnya memutuskan berjalan kaki kembali ke lokasi semula.

Sesampainya di sana, ia mendapati rekan serta barang-barangnya sudah tidak ada.

Rekan korban menjelaskan bahwa pelaku sebelumnya telah mengambil ponsel dan motor tersebut dengan alasan yang sama.

Menyadari telah menjadi korban penipuan, korban segera menghubungi orang tuanya untuk meminta bantuan.

Keluarga kemudian membawa korban ke Mapolsek Winongan untuk melaporkan kejadian tersebut.

Nanang Abidin menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap identitas kedua pelaku.

Pihaknya juga telah meminta keterangan dari korban dan saksi-saksi di lokasi kejadian.

“Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para remaja, agar lebih waspada dan tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal meski mereka bersikap ramah atau meminta pertolongan dengan dalih apapun,” pungkas Nanang. **(kd/mh/day)**

JAWA TIMUR

KEPALA BIRO BOJONEGORO : Sutopo. TELEPON: 082244721416.

Pemkab Bojonegoro Siapkan Skema Bantu Peternak Ayam Gayatri

Bojonegoro, Memorandum

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) terus berupaya memperkuat keberlanjutan program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri). Di tengah kondisi harga pakan ternak yang masih tinggi dan harga telur yang mengalami penurunan, Disnakan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membantu para peternak penerima manfaat program.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, drh. Indra Firmansyah menjelaskan, salah satu upaya yang tengah dibahas adalah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung kebutuhan peternak. Bentuk dukungan tersebut masih dalam tahap pembahasan, yakni antara pengadaan alat pengolah pakan atau pemberian bantuan berupa subsidi pakan ternak.

Menurutnya, keputusan tersebut akan mempertimbangkan kondisi yang dihadapi peternak saat ini, di mana biaya pakan terus meningkat sementara harga jual telur mengalami penurunan.

“Skema yang akan dipilih masih dalam pembahasan, apakah melalui pengadaan alat pengolah pakan atau bantuan berupa subsidi pakan. Namun yang jelas, langkah

tersebut akan segera direalisasikan dalam waktu dekat karena melihat kondisi peternak saat ini,” jelasnya.

Selain menyiapkan dukungan terhadap biaya produksi, Disnakan juga akan menindaklanjuti arahan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah untuk memperluas penyerapan telur hasil peternak Program Gayatri.

Sebagai tindak lanjut, Disnakan berencana mengumpulkan para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna membahas mekanisme penyerapan telur dari peternak Gayatri. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan para peternak.

Meski demikian, penyaluran telur ke SPPG diper-

rakan tetap akan menggunakan skema melalui pihak ketiga. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban (SPJ) yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan di SPPG.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan Program Gayatri, sehingga mampu meningkatkan produktivitas peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. **(top/day)**

Peternak ayam tergabung dengan Gayatri menunjukkan kemandirian masyarakat.



Kapolres Tuban: Peningkatan Status Menjadi Polresta Sesuai Perkembangan Daerah

Tuban, Memorandum

Momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi ajang penyampaian kabar penting bagi masyarakat Kabupaten Tuban. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menjelaskan bahwa peningkatan status Polres Tuban menjadi Polresta dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan strategis, seiring pesatnya perkembangan daerah.

Kapolres mengungkapkan,

salah satu faktor utama yang menjadi dasar peningkatan tipe tersebut adalah semakin berkembangnya Kabupaten Tuban, baik dari sisi pembangunan maupun pertumbuhan investasi. Kehadiran sejumlah proyek industri berskala besar dinilai membawa perubahan signifikan terhadap dinamika wilayah yang membutuhkan penguatan pelayanan dan pengamanan kepolisian.

“Itu salah satu pertimbangan kenapa Polres Tuban harus dinaikkan tipenya menjadi Polresta,” ungkap alumni Akpol 2006 tersebut.

Dengan peningkatan status ini, diharapkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin optimal serta mampu menjawab tantangan keamanan dan ketertiban di tengah pesatnya pembangunan daerah.

Kapolres juga berharap sinergitas antara Polri, Peme-

rintah Kabupaten Tuban, TNI, DPRD, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat terus terjalin erat demi mendukung terwujudnya Kabupaten Tuban yang semakin maju, aman, dan kondusif.

Usai pelaksanaan upacara Hari Bhayangkara ke-80, suasana berlangsung penuh keakraban. Jajaran Kodim 0811 Tuban memberikan kejutan berupa tumpeng sebagai ucapan selamat kepada Polres

Tuban.

Momen tersebut menjadi simbol kuatnya soliditas dan sinergitas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tuban. Kebersamaan yang ditunjukkan kedua institusi diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. **(top/day)**



AKBP Alaidin

Wabup Sidoarjo Tanam 644 Pucuk Merah

Ajak PKL dan Warga Jaga Kebersihan

Sidoarjo, Memorandum

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana memimpin penanaman 644 bibit pucuk merah dalam Program 1 PNS 1 Pohon Gelombang IV di Jalan Raya Gading Fajar 2 hingga Desa Sepande, Kecamatan Candi.

Kegiatan penghijauan tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Badan Pelayanan Pajak Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, PLN Sidoarjo, serta RSIA Ibu dan Anak Pondok Jati.

Sebanyak 644 bibit pucuk merah ditanam di sepanjang ruas jalan sebagai upaya memperluas ruang hijau sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih teduh, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Mimik Idayana mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di kawasan tersebut. Menurutnya, kesempatan berjualan yang telah diberikan pemerintah harus diimbangi dengan kesadaran menjaga kebersihan.

“Saya mohon kepada para PKL yang sudah diberikan kesempatan untuk berjualan di sini agar benar-benar menjaga kebersihan. Sampahnya jangan ditinggalkan begitu saja. Kalau memungkinkan, sampahnya dibawa pulang. Jangan dibuang sembarangan sehingga

membuat lingkungan menjadi kotor,” tegasnya.

Selain itu, ia mengatakan penanaman pohon bukan sekadar mempercantik kawasan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk merawatnya. Ia berharap masyarakat, termasuk warga sekitar dan para PKL, ikut menjaga pohon-pohon yang telah



Wabup Mimik Idayana memimpin penanaman 644 bibit pucuk merah di Kecamatan Candi, Sidoarjo.

ditanam agar tumbuh dengan baik.

“Sebanyak 644 pohon yang kita tanam hari ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Saya berharap seluruh masyarakat ikut menjaga pohon-pohon ini karena manfaatnya akan

kembali kepada kita semua,” ujarnya.

Ia menambahkan, wujudkan Sidoarjo yang hijau, bersih, dan nyaman membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat yang dimulai dari lingkungan terdekat. (hum/jok/fer)

DIJUAL CEPAT

Vila Pacet. Luas Tanah 420 M2





Lokasi = RT 03 RW 01 Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Status Tanah SHM (Sertifikat Hak Milik). Atas nama sendiri.

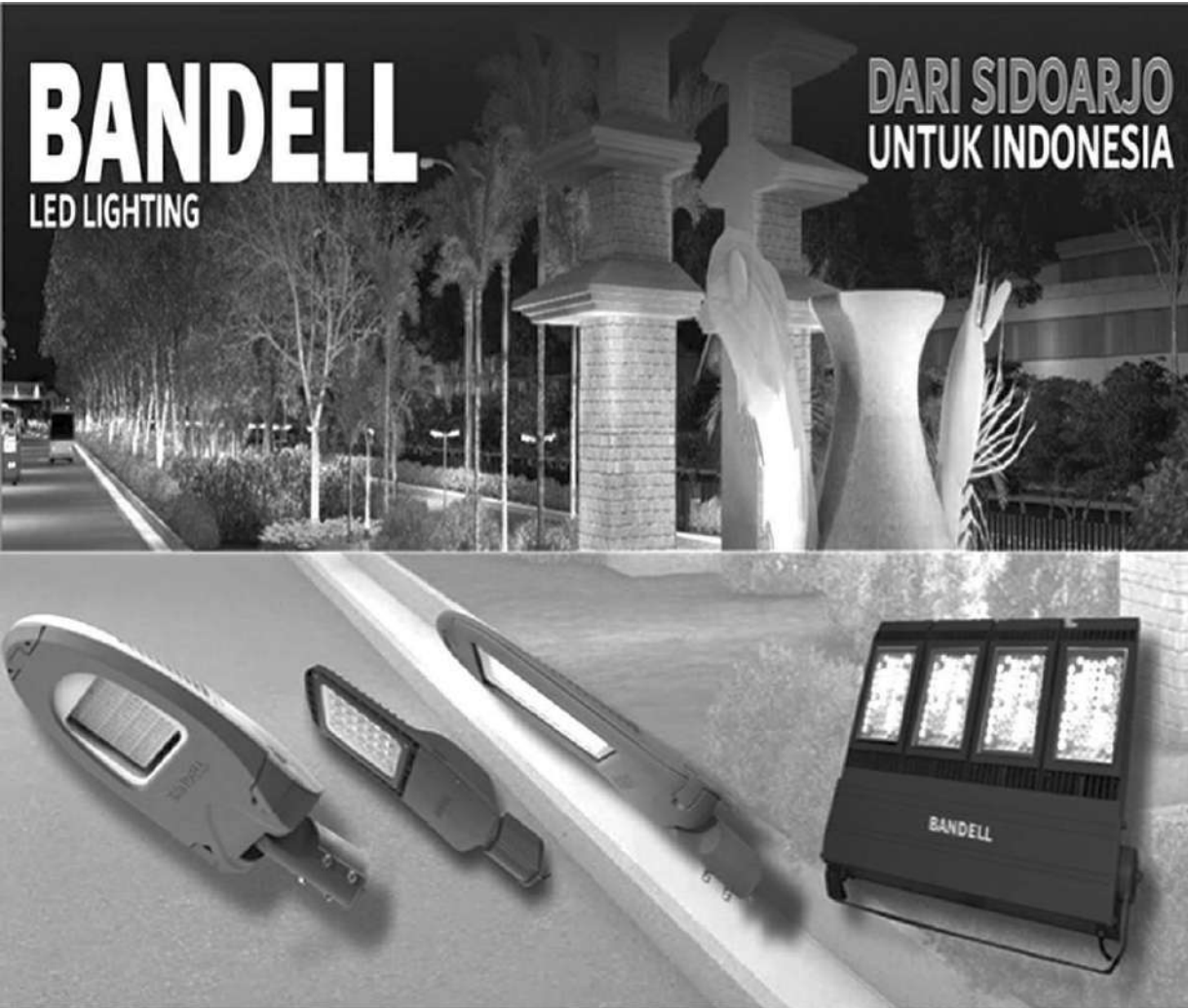
Fasilitas = 3 KT, 4 KM, 3 RT, 2 Teras dan 1 Dapur plus Halaman Luas.

Lokasi strategis dekat Pemandian Air Panas Pacet. HARGA BISA NEGOTIASI

Berminat Hubungi = Telepon 081235363721

BADELL

LED LIGHTING



DARI SIDOARJO
UNTUK INDONESIA

PRODUK LAMPU
KEBANGGAAN SIDOARJO











GRESIK

Polisi Gerebek Dua Warkop Penjual Miras Ilegal

Sita 70 Botol

Gresik, Memorandum

Dua warung kopi (warkop) di Kecamatan Panceng mendadak didatangi polisi. Bukan karena ramai pembeli, melainkan diduga menjadi tempat peredaran minuman keras (miras) ilegal. Hasilnya, sebanyak 70 botol miras berbagai merek dan jenis disita dalam razia tersebut.

Penggerebekan dilakukan setelah Polsek Panceng menerima laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas penjudian miras di kawasan tersebut. Kapolsek Panceng AKP Khoiril Alam mengatakan, lokasi pertama yang disasar petugas berada di sebuah warkop di Jalan Raya Desa Doudo, Kecamatan Panceng. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan 10 botol miras yang terdiri dari bir Bintang hingga tuak.

Warung tersebut diketahui milik Heri Kiswanto (38), warga Desa Banjaranyar, Kecamatan

Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

Tak berhenti di situ, petugas kemudian bergerak ke sebuah warkop di Desa Surowiti, Kecamatan Panceng. Di lokasi kedua ini, polisi menemukan jumlah yang jauh lebih banyak, yakni 60 botol miras siap edar. Warung tersebut dikelola Toyib (31), warga setempat.

“Total 70 botol miras berhasil diamankan. Razia ini merupakan upaya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) di wi-

layah hukum Polsek Panceng,” ujar AKP Khoiril Alam, Senin (6/7).

Seluruh barang bukti beserta kedua pemilik warung langsung dibawa ke Mapolsek Panceng. Keduanya akan menjalani proses hukum melalui tindak pidana ringan (tipiring) sesuai ketentuan yang berlaku.

AKP Khoiril menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Penindakan terhadap peredaran miras ilegal akan terus kami lakukan secara berkala sebagai upaya pemeliharaan Harkamtibmas,” tandasnya. (rez/fer)



Petugas Polsek Panceng menunjukkan puluhan botol minuman keras yang disita dari dua warung kopi di Kecamatan Panceng, Gresik.

btñ

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (Open Bidding) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo terdapat debitor yang telah dikategorikan kredit bermasalah (Cidera Janji/Wanprestasi) sebagai berikut :

- RIZKY ALFIANFAJAR, berupa :
 - Selesai : 21 Juli 2026
 - Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
 - Batas akhir penawaran : 21 Juli 2026 pukul 11:15 WIB (sesuai waktu server)
 - Alamat Domain : lelang.go.id
 - Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo

Penetapan Pemenang

Syarat-syarat lelang :

1. Calon peserta lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui alamat domain lelang.go.id secara open bidding Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Procedure" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.

2. Peserta lelang wajib menyertai uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah diterima oleh KPKNL Sidoarjo selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) rekening Bank masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas terdapat diid.

3. Kondisi tanah dan bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

4. Bea Lelang yang terbentuk sebesar 2% dari harga lelang (Harga Lelang Yang Terbentuk) menjadi tanggungan pemenang lelang.

5. Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penjaminan lain-lain.

6. Info lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Regional Loan Quality Jalan Bali Nusra, Contact Person Sdr. Satriatama Adhyaksa (0819-1303-0111) dan Sdr. Nashrudin S W (0856-513-528).

07 Juli 2026

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

KPKNL SURABAYA

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

mandiri

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitor atas nama :
Mochamad Sobirin, Berupa :

- Selesai : 21 Juli 2026
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas akhir penawaran : 21 Juli 2026 pukul 13:30 WIB (Sesuai Waktu Server)
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Tempat Lelang : Kpknl Surabaya

Penetapan Pemenang

Syarat-syarat lelang :

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.

2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: lelang.go.id

3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.

4. Peserta yang berminat sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.

5. Peserta Lelang diwajibkan menyertai uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.

7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.

8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).

10. Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.

11. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.

12. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management VIII / Jawa 3 Telp. (031) 5661371-74 atau KPKNL Surabaya Telp. (031) 3573953, 3523516

Surabaya, 07 Juli 2026

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Retail Asset Management VIII / Jawa 3

KPKNL SURABAYA

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

mandiri

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitor atas nama :
Saipul, berupa :

- Selesai : 21 Juli 2026
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas akhir penawaran : 21 Juli 2026 pukul 10:15 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Tempat Lelang : Kpknl Surabaya

Penetapan Pemenang

Syarat-syarat lelang :

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.

2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: lelang.go.id

3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.

4. Peserta yang berminat sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.

5. Peserta Lelang diwajibkan menyertai uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.

7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.

8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).

10. Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.

11. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.

12. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management VIII / Jawa 3 Telp. (031) 5661371-74 atau KPKNL Surabaya Telp. (031) 3573953, 3523516

Surabaya, 07 Juli 2026

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Retail Asset Management VIII / Jawa 3

KPKNL SURABAYA

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

mandiri

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitor atas nama :
Eko Purnomo, Berupa :

- Selesai : 21 Juli 2026
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas akhir penawaran : 21 Juli 2026 pukul 10:45 WIB (Sesuai Waktu Server)
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Tempat Lelang : Kpknl Surabaya

Penetapan Pemenang

Syarat-syarat lelang :

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.

2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: lelang.go.id

3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.

4. Peserta yang berminat sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.

5. Peserta Lelang diwajibkan menyertai uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.

7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.

8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).

10. Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.

11. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.

12. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management VIII / Jawa 3 Telp. (031) 5661371-74 atau KPKNL Surabaya Telp. (031) 3573953, 3523516

Surabaya, 07 Juli 2026

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Retail Asset Management VIII / Jawa 3

KOTA SURABAYA

Konser Denny Caknan Ricuh

Eri Perintahkan Evaluasi Total



Aksi saling dorong ribuan penonton konser Denny Caknan hingga merobohkan pagar pembatas.

Surabaya, Memorandum

Kericuhan yang mewarnai konser gratis penyanyi Denny Caknan pada rangkaian Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center (SUBEC), Minggu (5/7) malam, berbuntut evaluasi menyeluruh.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengevaluasi total penyelenggaraan acara, sekaligus menanggung seluruh biaya pengobatan korban yang terluka dalam insiden tersebut.

Menurut Eri, evaluasi dilakukan untuk mengungkap penyebab membludaknya penonton hingga berujung aksi saling dorong di pintu masuk venue.

“Evaluasi tetap akan kita lakukan. Nanti kita lihat juga apakah memang banyak pengunjung dari luar Surabaya,” ujar Eri, Senin (6/7). Berdasarkan la-

■ Bersambung ke halaman 10



Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi



Petugas medis menangani korban saat di lokasi kejadian.

DPRD Panggil Kadinkes, Soroti Layanan RSUD

KERICUHAN konser gratis Denny Caknan di Surabaya Expo Center (SUBEC) tak hanya menyisakan korban luka, tetapi juga memicu sorotan terhadap kesiapsiagaan layanan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya.

DPRD Kota Surabaya memastikan akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie guna mengevaluasi penanganan korban pada malam kejadian.

Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari korban yang mengaku tidak memperoleh penanganan secara cepat saat dievakuasi ke rumah sakit. “Di mana ada kerumunan besar, fasilitas ke-

■ Bersambung ke halaman 10



Syaifuddin Zuhri



Korban mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

Penanganan Korban Sesuai Prosedur

DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya memastikan seluruh korban keriuhan konser gratis Denny Caknan di Surabaya Expo Center (SUBEC) telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur. Bahkan, lima ambulans

lengkap dengan tenaga medis serta delapan dokter telah disiagakan untuk menangani korban sejak proses evakuasi di lokasi hingga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. Mohamad Soewandhie. Kepala Dinas Kesehatan-

an Kota Surabaya dr Billy Daniel Messakh mengatakan, berdasarkan data awal terdapat 10 korban yang dievakuasi ke RSUD dr Mohamad Soewand-

■ Bersambung ke halaman 10

Cak Ji Desak Terduga Pelaku Kembalikan Uang

Modus Bakaran Telan Korban

Surabaya, Memorandum

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji turun tangan mediasi dugaan penipuan penjualan sembako murah yang diduga merugikan puluhan warga hingga lebih dari Rp1 miliar.

Bersama sekitar 20 korban, Cak Ji mendatangi kediaman terduga pelaku, Indah Choirunnisa, di kawasan Wonorejo, Rungkut, untuk meminta pertanggungjawaban dan mendesak pengembalian kerugian para korban.

Kasus ini bermula dari penawaran sembako murah melalui status WhatsApp yang diduga berlangsung sejak 2021 hingga 2025. Para korban mengaku tergiur karena harga yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar.

Salah seorang korban, Elzatul Fadilah, mengaku mulai bertransaksi setelah melihat penawaran tersebut pada 19 Februari 2026. Ia memesan 750 dus Minyakita dan 1.050 dus mi instan dengan sistem uang muka (deposit) sebesar 10 persen. Namun, barang yang dijanjikan tidak pernah diterima sesuai kesepakatan.

Mantan pegawai terduga pelaku, Ricco, mengungkapkan modus yang diduga digunakan adalah sistem “bakaran”, yakni menjual barang di bawah harga pasar untuk menarik kepercayaan calon pembeli. “Dia menjual rugi. Barang yang dibeli sekitar Rp 160 ribu dijual Rp 140 ribu hingga Rp 150 ribu. Saya tidak tahu motifnya, tetapi seolah-olah tujuannya agar orang percaya lalu menguasai uang para korban,” ujarnya, Senin (6/7). Menurut para korban, terduga pelaku juga sempat memberikan jaminan berupa sertifikat tanah. Namun, setelah dilakukan

diduga digunakan adalah sistem “bakaran”, yakni menjual barang di bawah harga pasar untuk menarik kepercayaan calon pembeli. “Dia menjual rugi. Barang yang dibeli sekitar Rp 160 ribu dijual Rp 140 ribu hingga Rp 150 ribu. Saya tidak tahu motifnya, tetapi seolah-olah tujuannya agar orang percaya lalu menguasai uang para korban,” ujarnya, Senin (6/7). Menurut para korban, terduga pelaku juga sempat memberikan jaminan berupa sertifikat tanah. Namun, setelah dilakukan

■ Bersambung ke halaman 10



Cak Ji memediasi antara terduga pelaku dan korban penipuan sembako murah.

Kortastipidkor Geledah Bea Cukai Juanda

DJBC Beri Akses Penuh Penyidik

Surabaya, Memorandum

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I akhirnya buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Korps Pembantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Mabes Polri di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda.

DJBC menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan akses penuh kepada penyidik. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan kasus



Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I, Rusman Hadi, memberikan informasi perkembangan terkait penggeledahan di Bea Cukai Juanda beberapa waktu lalu.

■ Bersambung ke halaman 10



Salah satu titik genangan air di kawasan Penjaringan Sari.

120 Titik Banjir Jadi Pekerjaan Rumah Pemkot

Surabaya, Memorandum

Sebanyak 120 titik genangan di Surabaya menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 2026.

Penanganannya akan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur drainase, normalisasi saluran, hingga peningkatan kapasitas sistem pengendali banjir.

Namun, pemkot menilai upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa dukungan pemerintah pusat. Pasalnya, sejumlah sungai utama yang menjadi jalur pembuangan air menuju laut mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Kepala Dinas Sumber Daya

Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Hidayat Syah, mengatakan penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab melakukan normalisasi sungai yang menjadi kewenangannya. “Kita tidak bisa berbicara Kota Surabaya saja yang bekerja. Di sisi lain, ada kewajiban pemerintah pusat yang juga harus dilakukan,” ujar Hidayat, Senin (6/7).

Ia menjelaskan, sedimentasi di Sungai Surabaya, Kalimas, hingga Kali Jagir saat ini sudah cukup tinggi sehingga pengerukan lumpur perlu segera dilakukan. Selain itu, pemba-

ngunan pintu air baru di muara Kali Jagir dinilai mendesak untuk memperlancar aliran air ke laut.

“Percuma kita membangun banyak saluran di hulu jika muaranya mengalami pendangkalan,” tegasnya.

Menurut Hidayat, Pemkot Surabaya telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat agar normalisasi sungai dan pembangunan pintu air tersebut segera direalisasikan.

Sementara itu, Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya, Adi Gunita, menjelaskan penanganan banjir mengacu pada blueprint mitigasi yang disusun sejak 2020. Dari 1.015 titik genangan yang

terpetakan saat itu, sebanyak 440 titik telah berhasil dituntaskan hingga akhir 2025.

“Pada 2026 ini sekitar 120 titik akan kami tangani secara bertahap. Di saat yang sama, kami juga menyiapkan perencanaan untuk pelaksanaan pekerjaan pada 2027,” katanya.

Adi menjelaskan, pemkot memiliki kewenangan menangani sekitar 340 saluran drainase lokal dan permukiman. Namun, efektivitas saluran tersebut sangat bergantung pada sekitar 30 saluran primer yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)

■ Bersambung ke halaman 10



Pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto saat penge-
sahan perda LPJ APBD 2025.

DPRD Setujui LPJ APBD 2025, Pemkab Mojokerto Pertahankan WTP ke-12

Mojokerto, Memorandum

DPRD Kabupaten Mojokerto resmi menye-
tujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna,
Senin (6/7). Persetujuan ini menjadi bukti sinergi
antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga
tata kelola keuangan daerah yang transparan
dan akuntabel.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Ayni Zuroh dan
dihadiri Bupati Mojokerto Dr. H. Muhammad Al
Barra (Gus Barra), Wakil Bupati dr. Muhammad
Rizal Octavian, Forkopimda, Sekda Teguh Gunar-
ko, serta jajaran kepala OPD.

Salah satu capaian yang mendapat apresiasi
DPRD adalah keberhasilan Pemkab Mojokerto
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecu-
alian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) untuk ke-12 kali berturut-turut. Selain itu,
realisasi pendapatan daerah tahun 2025 menca-
pai Rp2,824 triliun atau 102,10 persen dari target
yang ditetapkan.

Juru Bicara Fraksi PKS, Arif Afifuddin, menye-
but capaian tersebut menunjukkan pengelolaan
keuangan daerah berjalan sesuai aturan. Meski
demikian, DPRD meminta pemerintah mening-
katkan efektivitas penyerapan anggaran, khusus-
nya belanja modal, agar manfaat pembangunan
lebih cepat dirasakan masyarakat," tegas Gus
Barra.

Menanggapi hal itu, Bupati Gus Barra me-
mastikan seluruh masukan DPRD akan menjadi
bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD 2026.
"Masukan, kritik, dan saran dari DPRD akan
kami jadikan evaluasi agar pelaksanaan APBD
lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat
yang lebih besar bagi masyarakat," tegas Gus
Barra.

Raperda LPJ APBD 2025 selanjutnya akan
diproses sesuai ketentuan hingga ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah. Pemkab Mojokerto
berharap capaian WTP ke-12 menjadi modal
untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan
publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. (adv/
war/fdn)

Dua Pria Surabaya Babak Belur Dihajar Massa

Bobol SD Negeri Brangkal, Curi Proyektor

Mojokerto, Memorandum

Aksi nekat dua pria asal Kota Surabaya mencuri
proyektor di SD Negeri Brangkal, Kecamatan Sooko,
Mojokerto, berakhir apes. Keduanya dipergoki warga
saat beraksi, menjadi sasaran amuk massa, lalu dia-
mankan anggota Polsek Sooko, Minggu (5/7).

Dua pelaku yang dia-
mankan masing-masing
berinisial RA (44) dan RZ
(33), warga Kecamatan
Kenjeran, Surabaya. Polisi
menyita barang bukti be-
rupa satu unit proyektor
merek Acer milik sekolah,
motor Honda Beat yang
dipakai pelaku, serta tas
berisi peralatan pembobol
bangunan seperti obeng
dan tang.

Kapolsek Sooko AKP
Achmad Doni Meidianto

menjelaskan, aksi pencuri-
an itu terjadi sekitar pukul
17.25 WIB. Seorang warga
yang melintas mencurigai
gerak-gerik dua pria di
sekitar SD Negeri Brangkal.

"Seorang pelaku terli-
hat memanjat pagar seko-
lah, sedangkan rekannya
menunggu di atas sepeda
motor di pinggir jalan,"
ujar Doni, Senin (6/7).

Merasa ada yang tidak
beres, warga melapor ke-
pada kepala dusun dan

penjaga sekolah. Bersama
sejumlah warga, mereka
kemudian mengepung
area sekolah untuk me-
mastikan dugaan pencu-
rian tersebut.

Tak berselang lama,
kedua pelaku keluar dari
lingkungan sekolah sambil
membawa tas berisi pro-
yektor milik sekolah. War-
ga langsung menghadang
dan berhasil menangkap
keduanya sebelum sempat
kabur.

Penangkapan itu sem-
pat memicu emosi warga.
Kedua pelaku menjadi sa-
saran amuk massa hingga
akhirnya personel Polsek
Sooko tiba di lokasi dan se-
gera mengevakuasi kedu-
anya untuk menghindari

aksi main hakim sendiri.

Dari hasil pemeriksa-
an, polisi mengamankan
satu unit proyektor Acer,
sepeda motor Honda Beat
yang digunakan sebagai
sarana kejahatan, serta
tas berisi obeng dan tang
yang diduga dipakai un-
tuk membobol bangunan
sekolah.

Akibat pencurian ter-
sebut, SD Negeri Brang-
kal mengalami kerugian
material sekitar Rp7 juta.
"Kerugian yang dialami
pihak sekolah diperkira-
kan mencapai Rp7 juta,"
kata Doni.

Saat ini, kedua tersang-
ka telah ditahan di Polsek
Sooko. Unit Reskrim ma-
sih melengkapi berkas pe-



Dua pemuda asal surabaya saat diamankan polisi.

nyidikan sebelum perkara
dilimpahkan. Keduanya
dijerat Pasal 477 ayat (1)
huruff dan g KUHP tentang

pencurian dengan pem-
beratan dengan ancaman
pidana sesuai ketentuan
yang berlaku. (war/fdn)

Cegah Hilangnya Dokumen Penting dan Jejak Sejarah Daerah

DPRD Jombang Kebut Raperda Kearsipan

Jombang, Memorandum

DPRD Kabupaten Jom-
bang mulai menggodok
Rancangan Peraturan Da-
erah (Raperda) tentang
Penyelenggaraan Kearsip-
an sebagai langkah mem-
perkuat tata kelola peme-
rintahan yang akuntabel
sekaligus melindungi do-
kumen-dokumen strategis
daerah. Pembahasan perda
inisiatif DPRD tersebut dia-
wali dengan rapat kerja dan
koordinasi bersama aka-
demisi penyusun naskah
akademik, Senin (6/7).

Ketua Badan Pembent-
ukan Peraturan Daerah
(Bapemperda) DPRD Jom-
bang, Kartiyono, menga-
takan regulasi itu, menjadi
kebutuhan mendesak kare-
na arsip merupakan fondasi
utama dalam penyelengga-
raan pemerintahan. Menu-
rutnya, pengelolaan arsip
yang baik akan menjamin
tersedianya rekam jejak
kebijakan dan program
pembangunan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

"Raperda ini merupa-
kan inisiatif DPRD. Hari ini
kami melakukan rapat kerja
dan koordinasi dengan aka-
demisi untuk membahas
penyelenggaraan kearsipan
di Kabupaten Jombang,"
ujarnya.

Kartiyono mengibarat-



DPRD Kabupaten Jombang mulai menggodok Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

kan sistem kearsipan seba-
gai memori internal pada
sebuah perangkat Android.
Jika arsip tidak dikelola
secara baik, pemerintah
daerah berisiko kehilangan
data penting yang menjadi
dasar pengambilan kebijak-
an maupun pertanggungja-
waan administrasi.

"Kalau pemerintah da-

erah diibaratkan sebuah
sistem Android, maka pe-
nyelenggaraan kearsipan
adalah memori internalnya.
Tanpa pengelolaan arsip
yang baik dan akuntabel,
pemerintah bisa kehilangan
catatan penting sehingga
mengganggu tata kelola
pemerintahan," jelasnya.

Ia menegaskan, pe-

nyelenggaraan kearsipan
merupakan amanat Und-
ang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsip-
an. Karena itu, pemerintah
daerah wajib memiliki sis-
tem pengelolaan arsip yang
mampu menjaga keamanan
dokumen penting, termasuk
arsip bernilai sejarah.

Tak hanya itu, Raperda

juga diarahkan untuk mem-
perkuat sistem disaster re-
covery atau pemulihan arsip
apabila terjadi bencana ma-
upun kerusakan data. Lang-
kah tersebut dinilai penting
agar dokumen strategis milik
pemerintah tetap terlindungi
dalam berbagai kondisi.

"Dokumen-dokumen
penting yang bernilai sejarah

harus dijaga. Jangan sampai
karena lemahnya pengelola-
an arsip, pemerintah daerah
mengalami kerugian yang
besar," katanya.

Menurut Kartiyono,
buruknya tata kelola arsip
dapat memicu tiga risiko
besar, yakni persoalan hu-
kum, kekacauan adminis-
trasi, serta hilangnya jejak
sejarah daerah. "Kami tidak
ingin Jombang menghadapi
musibah hukum, adminis-
trasi, maupun musibah
sejarah hanya karena pe-
ngelolaan arsip yang tidak
baik," tegasnya.

Ia menambahkan, hing-
ga saat ini masih terdapat
beberapa kabupaten/kota
di Jawa Timur yang belum
memiliki Perda Penyeleng-
garaan Kearsipan, termasuk
Kabupaten Jombang. Kare-
na itu, DPRD mendorong
pembahasan regulasi terse-
but dapat segera dituntas-
kan agar menjadi landasan
hukum yang kuat dalam
pengelolaan arsip daerah.

"Dengan perda ini, kami
berharap kualitas tata kelola
pemerintahan di Kabu-
paten Jombang semakin
baik, transparan, akuntabel,
sekaligus mampu menjaga
dokumen-dokumen pen-
ting untuk kepentingan
generasi mendatang," pun-
gkasnya. (adv/war/fdn)

Datangi DPRD, PKL Gerdupapak Dapat Kepastian Soal Status Zona dan Jam Operasional

Jombang, Memorandum

Keresahan puluhan pe-
dagang kaki lima (PKL) yang
tergabung dalam Paguyub-
an Gerdupapak akhirnya
terjawab. Setelah menda-
tangi DPRD Jombang dan
mengikuti hearing bersama
Komisi B, Senin (6/7), me-
reka mendapatkan kepastian
bahwa Jalan KH Hasyim
Asy'ari tetap berstatus zona
kuning.

Artinya, tidak ada ren-
cana mengubah kawasan
tersebut menjadi zona me-
rah yang melarang aktivitas
berdagang. Kepastian itu di-
sampaikan setelah Komisi B
DPRD melakukan klarifikasi
kepada pemerintah daerah
terkait isu yang belakangan
beredar di kalangan peda-
gang.

Perwakilan Paguyuban
Gerdupapak, Masrur, me-
ngatakan para PKL sengaja
mendatangi DPRD karena
khawatir dengan kabar pe-
rubahan zonasi yang dinilai
mengancam mata penca-
harian mereka. "Kalau be-
nar berubah menjadi zona
merah, otomatis kami tidak



DPRD Kab Jombang saat menerima kedatangan PKL.

boleh berjualan. Padahal
berdagang adalah sumber
penghasilan kami," ujarnya.

Selain meminta keje-
lasan soal status zonasi,
para pedagang juga me-
nyampaikan keluhan terkait
pemasangan portal di ka-
wasan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Parimono yang dini-

lai menghambat aktivitas
mereka. Mereka berharap
persoalan tersebut segera
mendapat solusi.

Tak hanya itu, PKL juga
meminta evaluasi terhadap
pembatasan jam operasi-
onal hingga pukul 23.00.
Menurut Masrur, sebagi-
an besar pedagang baru

membuka lapak sekitar
pukul 19.00 sehingga wak-
tu berjualan hanya sekitar
empat jam.

"Rata-rata kami mulai
jualan pukul 19.00. Kalau
harus tutup pukul 23.00,
waktunya sangat terbatas
sehingga pendapatan juga
berkurang," katanya.

Ketua Komisi B DPRD
Jombang, Anas Burhani,
menegaskan bahwa hasil
koordinasi dengan pihak
eksekutif memastikan tidak
ada aturan maupun renca-
na mengubah status Jalan
KH Hasyim Asy'ari menjadi
zona merah.

"Kami sudah melaku-
kan crosscheck kepada
pihak eksekutif. Ternyata
tidak ada aturan maupun
rencana menjadikan Jalan
KH Hasyim Asy'ari sebagai
zona merah. Statusnya te-
tap zona kuning sehingga
PKL masih diperbolehkan
berjualan," tegasnya.

Terkait jam operasional,
Anas mengakui pema-
batasan hingga pukul 23.00
memang diatur dalam Pe-
raturan Bupati. Namun, me-
nurutnya, aturan tersebut
layak dievaluasi dengan
mempertimbangkan kon-
disi ekonomi masyarakat.

"Kalau pedagang baru
buka pukul 19.00 lalu harus
tutup pukul 23.00, tentu
waktu berdagangnya sa-
ngat singkat. Kami akan
berkomunikasi dengan pe-

merintah daerah agar ada
evaluasi dan kemungkinan
penambahan jam operasi-
onal," ujarnya.

Pembahasan mengenai
portal di kawasan RTH Pa-
rimono juga akan ditindak-
lanjuti melalui koordinasi
Komisi B bersama Dinas
Lingkungan Hidup (DLH).
Meski membuka ruang eva-
luasi, DPRD meminta para
PKL tetap mematuhi aturan
yang berlaku dengan me-
naga ketertiban, kebersih-
an, dan keamanan selama
berjualan.

"Kami ingin PKL tetap
bisa mencari nafkah, tetapi
juga menjaga ketertiban se-
hingga keberadaan mereka
tidak mengganggu masya-
rakat maupun pengguna
jalan," tambah Anas.

Sementara itu, Kepala
Satpol PP Kabupaten Jom-
bang, Samsudi, memasti-
kan hingga kini tidak ada
kebijakan yang mengubah
status Jalan KH Hasyim
Asy'ari menjadi zona me-
rah.

"Kami sendiri belum
mengetahui adanya renca-

na perubahan zona merah.
Jadi statusnya masih zona
kuning dan teman-teman
PKL tetap diperbolehkan

berjualan sesuai jam ope-
rasional yang telah disepa-
kati," pungkasnya.

(adv/war/fdn)

**BADAL
HAJI**
Haji Amanah
(Haji yang diwakilkan)
Juga Menerima
"BADAL UMROH"
SUDAH TERMASUK :
Sertifikat yang dipigora,
Air Zam-zam, Sajadah
& Jam dinding
PASTIKAN HUBUNGI BADAL HAJI

**KBIHU
PESAWAT**
(Pedepakan Samudra Sholawat)
Jl. Tenggilis Lama 3B No. 48 Surabaya
Telp : (031) 8492856
HP : 0821 3190 9393, 0857 9920 9393



Subkor Pencegahan dan Pengendalian Pengakit Menular (P2PM) Agoes Yudi Purnomo.

Waspada Penularan AIDS di Magetan 78 Warga Positif Terinfeksi HIV

Magetan, Memorandum
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Magetan menemukan 78 kasus baru AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) periode Januari - Juni 2026. Hal itu disampaikan Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Magetan, Agoes Yudi Purnomo, Senin (6/7).
Ia mengungkapkan, mayoritas penderita HIV kalangan penyuka Laki Suka Laki (LSL) atau Gay. "Temuan kasus HIV di Kabupaten Magetan ada 78 kasus periode bulan Januari - Juni 2026. Dari jumlah tersebut, penderita didominasi oleh laki-laki sebanyak 53 orang, sementara perempuan sebanyak 25 orang," ujar Agoes, Senin (6/7).
Dinkes Magetan mencatat, penularan HIV di Kabupaten Magetan kelangan LSL, Selain itu, ada juga kelompok rentan seperti ibu hamil 2 kasus.
Sebagai perbandingan, sepanjang tahun 2025 lalu, Kabupaten Magetan mencatat total ada 93 kasus HIV, ironisnya Tahun 2026 baru semester awal kasus HIV baru sudah mencapai 78 Kasus.
Temuan 78 kasus tersebut didapatkan melalui serangkaian pemeriksaan rutin maupun proaktif yang digelar di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) yang tersebar di Kabupaten Magetan, mulai dari Puskesmas, klinik swasta, hingga rumah sakit.
"Temuan 78 kasus tersebut lewat pemeriksaan atau skrining di Puskesmas, klinik, rumah sakit," pungkask Agoes Yudi Purnomo. (sep/rik/fdn)

Proyek TPA Botok Diprediksi Habiskan Rp 150 M

Pemkab Andalkan Uluran Tangan Pusat

Magetan, Memorandum

Anggaran pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Botok, Kecamatan Karas diprediksi menghabiskan anggaran Rp 150 Miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) Kabupaten Magetan Eny Purwanti mengatakan, lokasi TPA baru belum bisa beroperasi, meskipun saat ini TPA Milangasri overload sejak 6 tahun lalu atau 2020. "Kondisinya sudah sa-

ngat mengkhawatirkan ya, karena kan harusnya sudah tutup di 2020. Sedangkan lokasi TPA baru, belum memungkinkan untuk digunakan, akses jalan belum layak, fasilitas penunjang juga belum ada," katanya, Senin (6/7).

Dijelaskan Eny Purwanti, pembangunan TPA Botok

bakal memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga Pemkab Magetan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menangani pembangunan TPA Botok tersebut.

"Kami sedang mengusulkan ke pusat untuk pembangunannya jadi ya tergantung kesediaan anggaran dari pusat juga. Kami

berharapnya bisa segera dibangun tahun depan," harap Eny.

Dari estimasi sementara anggaran Rp 150 miliar itu, TPA Botok mampu menampung sampah dari seluruh Kabupaten Magetan.

"Kalo konsepnya kan TPST dengan lahan urug residu butuh sekitar 150M

itu di luar jalan akses, ketersediaan air & listrik menuju ke lokasi," ujarnya.

Sementara itu pihaknya memastikan seluruh perizinan yang diperlukan telah selesai diurus tanpa ada perizinan yang masih menggajal. "Ijin sudah clear," pungkask Kabid PSLB3 DLHP Magetan. (jkn/rik/fdn)



Tim DLHP meninjau lokasi calon TPA Baru.

BLITAR

KABIRO: Abdul Aziz - NOMOR WA: 0811318627

Pemkot Blitar Gelar Sosialisasi Jelang Operasionalisasi Sekolah Rakyat

Blitar, Memorandum

Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin memastikan operasionalisasi Sekolah Rakyat atau SR bakal dimulai pada 15 Juli 2026 mendatang. Saat ini, pembangunan dikebut dan hampir finalisasi.

"Sesuai dengan rencana 15 Juli 2026 memang sudah operasional. Melihat progresnya yang bagus, kami optimistis bisa dilaksanakan. Saat ini pembangunan terus dilakukan," kata Syauqul Muhibbin, Senin (6/7).

Dia menjelaskan sebelum operasionalisasi SR, pihaknya bakal sosialisasi. Utamanya kepada orangtua murid atau siswa yang bakal mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Nantinya, orangtua ba-

kal diundang untuk mendapatkan penjelasan mekanisme selama buah hatinya mengikuti KBM atau tinggal di asrama. Harapannya, orangtua tidak khawatir. Karena diakui atau tidak, masih banyak yang menganggap KBM di SR, seperti layaknya asrama tanpa pendampingan.

"Padahal ini salah. Nantinya, anak didik akan didampingi terus. Jadi ada pendamping khusus atau guru wali. Kalau untuk tingkat SD dan SMP, kami siapkan 27 pendamping," katanya.

Dia menjelaskan lagi, sesuai dengan rencana, SR yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul itu bakal menampung 270 siswa atau anak didik. Mereka terdiri SD, SMP hingga SMA. Mereka adalah yang masuk dalam desil 1, atau kategori tak mampu. Tak

hanya berasal dari Kota Blitar, tetapi juga daerah sekitar. Saat ini, yang siap untuk tinggal di SR sebanyak 70 siswa.

"Nah, sisanya ini akan kami dampingi pelan-pelan agar bersedia tinggal di asrama nantinya. Kan semua butuh waktu. Tidak semua orangtua atau siswa paham dengan mekanisme di SR," katanya.

Mas Ibin, panggilan akrabnya menambahkan lagi,

selama tinggal di SR, para siswa dipenuhi kebutuhannya. Bukan hanya makan dan minum, tetapi juga kebutuhan sekolah. Mulai buku, seragam, bahkan nantinya peralatan sekolah dalam bentuk laptop bagi siswa SMA.

"Semuanya terjamin selama di asrama SR. Dan satu hal lagi, ini bentuk perhatian pemerintah di bidang pendidikan," pungkasknya. (dul/fdn)



Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.

Bhabinkamtibmas Polsek Gandusari Sambang Petani Jagung Dukong Ketahanan Pangan

Blitar, Memorandum

Guna mendukung program ketahanan pangan nasional, Bhabinkamtibmas Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar turun gunung. Kali ini anggota Bhabinkamtibmas Aipda Angga, sambang dan dialogis dengan para petani jagung di Desa Gadungan, Senin (6/7).

Melalui kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas memberikan sosialisasi serta mengajak para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

Selain mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi sarana menyerap aspirasi serta mengetahui kendala yang dihadapi para petani.

"Ini juga sinergi antara polisi dengan petani untuk bersama-sama mewujudkan swasembada pangan. Dan ini kami terus lakukan sejumlah



Aipda Angga berdialog bersama petani di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari.

desa di wilayah kami," kata Kapolres Blitar AKBP Rivanda melalui Kapolsek Gandusari AKP Nanang Budhiarto.

Dia menyampaikan, kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat adalah wujud komitmen Polri bukan mendukung program ketahanan pangan nasional tetapi juga ada tujuan lain. Yakni memberikan motivasi kepada para petani agar terus semangat mengelola lahan pertanian.

"Dengan pendampingan dan

komunikasi yang baik, diharapkan ketahanan pangan dapat terus terjaga serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat," ujar.

Pada kesempatan itu, Bhabinkamtibmas juga sosialisasi tentang layanan yang saat ini terus digaungkan polisi. Yakni layanan call centre 110. Dengan layanan ini, ketika ada kejadian atau hal-hal yang mengganggu ketertiban, bisa memanfaatkan. Nantinya, polisi akan turun ke lokasi. (dul/fdn)

Mudahkan Layanan, Imigrasi Blitar Buka Layanan Pasporia Pemohon Bisa Urus Paspor di Hari Libur

Blitar, Memorandum

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar kembali menggelar layanan Pasporia (Paspor Minggu Ceria) di wilayah kerjanya. Kali ini giat di kawasan Car Free Day (CFD) Tulungagung, Minggu (5/7).

Layanan ini menjadi solusi, utamanya kepada pemohon yang belum memiliki waktu luang untuk mengurus paspor pada hari kerja. Nah, dengan keberadaan layanan ini pemohon bisa mendapatkan kemudahan karena layanan digelar pada hari libur.

Kepala Kantor Imigrasi Blitar, Aditya Nursanto, mengatakan layanan Pasporia itu sebagai wujud komitmen dalam mempermudah warga mengantongi paspor.

"Harapannya dengan layanan ini, kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mengurus paspor pada hari

kerja. Dengan menghadirkan layanan di hari Minggu, pemohon dapat mengurus paspor dengan lebih nyaman tanpa harus mengganggu aktivitas maupun pekerjaannya. Digelar pada hari libur," ujar Aditya, Senin (6/7).

Dia mengatakan untuk mendapatkan layanan Pasporia itu bisa mendatangi tenda yang telah disiapkan. Di Tulungagung misalnya, yang notabene masuk wilayah Kantor Imigrasi Blitar, mendatangi CFD di perempatan Jalan Ahmad Yani atau tak jauh dari Alun-Alun Tulungagung.

Bukan hanya layanan penerbitan paspor baru, tetapi juga ajang konsultasi. Seperti bagaimana persyaratan dan prosedur pembuatan paspor, konsultasi terkait paspor hilang maupun rusak, serta berbagai layanan keimigrasian lainnya.

"Dan yang lebih penting lagi, warga juga diajak meman-



Sejumlah warga memanfaatkan layanan di tenda Imigrasi pada Car Free Day.

faatkan layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi agar proses pengurusan dokumen menjadi lebih mudah dan efisien," katanya lagi.

Dia menambahkan lagi, layanan jemput bola itu juga wujud semangat "Imigrasi untuk Rakyat". Artinya, komitmen imigrasi menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat, responsif, dan berorientasi pada

kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin memastikan layanan keimigrasian dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan lebih mudah. Karena itu, Imigrasi Blitar akan terus menghadirkan inovasi pelayanan yang adaptif, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai semangat Imigrasi untuk Rakyat," pungkasknya. (dul/fdn)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, P.T. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk akan melakukan Pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan sesuai Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan, terhadap debitur atas nama:

MOHAMMAD RAHMAN	Objek Lelang Agunan : Sebidang tanah beserta bangunan SHM NO. 00716, Luas Tanah 149 m², Luas Bangunan 45 m², a.n MOHAMMAD RAHMAN, terletak di TRUNOJOYO REGENCY BLOK E NO 35, DESA MARENGAN DAYA, KECAMATAN KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR.	113.000.000	22.600.000
------------------------	--	--------------------	-------------------

Persyaratan Lelang:

pembatalan/penundaan melaksanakan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL Pamekasan / PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bangkalan.

Cara penawaran	: Open Bidding (dengan mengakses url https://www.lelang.go.id)
Hari / Tanggal	: Selasa / 21 Juli 2026

Pelunasan harga lelang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	: 2 % dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	: KPKNL Pamekasan Jl. Stadion No 104, Pamekasan, Jawa Timur 69323

Info hub PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Bangkalan
Telp. 031-3098929 ext. 151
Bangkalan, 07 Juli 2026


PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
 Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1999

SURIPAH
Sebidang tanah sesuai SHM No. 00242 atas nama ACH. CHATIB, seluas 800 m² terletak di Desa Plangniran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten

Harga Limit Rp. 97.900.000,- (Uang Jaminan Rp. 20.000.000,-)
Pelaksanaan Lelang dengan jenis penawaran melalui Aplikasi Lelan
(Open Bidding):
Hari / Tanggal : Selasa, 21 Juli 2026

Batas Akhir Waktu Penawaran : Selasa, 21 Juli 2026 10:00 WIB
(sesuai waktu server)

Alamat Domain : **lelang.go.id**

Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KETERANGAN :

1. Nominal Uang yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal Lembaran Penawaran yang akan disurvekan.

3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Bea lelang penjual sebesar 2% dikenakan pada pemenang lelang.

1. Memiliki AKUN yang telah terverifikasi pada website **portal.lelang.go.id** dan/atau **lelang.go.id**. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website diatas.

2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui

3. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana

4. Info lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Regional Commercial & SME Asset Management - Jember
 Hotline 2022 5001 0500 atau tel. 031 5200000 ext 217

Surabaya, 07 Juli 2026
PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk
REGIONAL COMMERCIAL & SME ASSET MANAGEMENT - JBN

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang

Kunjungan Negara dan Ekonomi (KONE) Malang, tanggal 1980 pada hari Rabu, dengan tujuan
Tunjangan terhadap barang jaminan debitur atas nama **WIVINA SAPUTRI**, dengan obyek
lelang sebagai berikut : Sebidang Tanah seluas 78 m2 berikut bangunan yang berdiri
diatasnya, SHGB No. 02780 a.n. Wivina Saputri, Ahli Madya, terletak di Kel/Ds. Karangwidoro
Kec. Dau, Kab. Malang. Alamat : Perumahan The OZ Blok HB – 08, Malang.
Harga Limit: Rp. 666.000.000,- Uang Jaminan: Rp. 333.000.000,-
KETERANGAN:

KETERANGAN :

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Malang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERSYARATAN LELANG :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminal lelang

tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL Malang, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan PT. Balai Lelang Tunjungan, Jl. Tunjungan No. 86-88 (It. II) Surabaya.

PELAKSANAAN LELANG :

Cara penawaran	Open Bidding (Alamat Domain lelang.go.id)
Hari, Tanggal	Selasa, 21 Juli 2026
Waktu	Pada pukul 10.00 WIB

Waktu Penawaran	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	21 Juli 2026, Pukul 10.30 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan harga lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	2 % dari harga lelang
Terdapat	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang.

Tempat Lelang	Jl. S. Supriyadi No. 157 Malang
Surabaya, 07 Juli 2026	
PT. Balai Lelang Tunjungan	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
KPKNL Malang	
INFO HUBUNGI : 0821.4092.9525 / 081.7500.4000/ IG: @balangan_sby / web: lelangtunjungan.i	

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Nganjuk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perintah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, melalui jasa pra lelang PT Bala

Lelang Tunjungan terdapat barang jaminan debitur atas nama **MOH SYAIFUDDIN** dengan obyek lelang sbb: Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 260 m2, berikut bangunan tanahnya, dan segala sesuatu di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik NIB. 12.2600077313.0 tercatat atas nama **MOH SYAIFUDDIN**, terletak di Desa Mojokambang, Kecamatan Bandarkedungmuliyah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. **Alamat: Jalan Desa Mojokambang, Desa Mojokambang, Kecamatan Bandarkedungmuliyah, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.**

Harga Limit: Rp1.108.200.000,- Uang Jaminan: Rp332.460.000,
KETERANGAN :
 • Nominal jaminan yang distorok ke Bank melalui rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
 • Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPNUL Malang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
 • Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERKARAATAN LELANG :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id.
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
3. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat menggugat.

perkenankan melakukan tuntutan kepada KPKN. Malang, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Nganjun dan PT Balai Lelang Tunjungan, Jln. Tunjungan No. 86-88 (lt. II), Kota Surabaya.

PELAKSANAAN LELANG :

Cara penawaran	Open bidding (dengan mengakses Alamat Domain lelang.go.id)
Hari, Tanggal	Selasa, 21 Juli 2026
Waktu Penawaran	Selai tawar pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Akhir Waktu Penawaran	21 Juli 2026 pukul 14:00 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang	Setelah batas akhir penawaran
Penulisan harga lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	2 % dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang

Lelang | **Jl. S. Supriyadi Nomor 157 Malang**
Nganjuk, 07 Juli 2026
PT Balai Lelang Tunjungan **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.** **KPKNL Malang**
Cabang Nganjuk
INFO HUBUNGI: 081.7500.4000 / 0878.2583.7531 / lelangtunjungan.id / IG: @balangan_sb

